

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendapatkan akses terhadap pendidikan merupakan hak setiap individu seperti yang tertuang pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di Indonesia sebagai bentuk pemenuhannya, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 6 ayat 1 dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Melalui undang-undang tersebut pemerintah kemudian membuat program wajib belajar dimulai pada usia 7 tahun, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008. Akan tetapi, dalam realitanya implementasi peraturan dan ketetapan tersebut masih belum terlaksanakan secara optimal.

Berdasarkan laporan Statistik Pendidikan 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka anak tidak sekolah (ATS) secara nasional terjadi pada usia 16-18 tahun (15,38%). Sementara untuk provinsi DKI Jakarta sendiri, ATS di usia 16-18 tahun mencapai 6,24%. Lebih lanjut dalam laporan tersebut disebutkan bahwa secara nasional, alasan utama tidak bersekolah lagi yaitu, merasa pendidikan cukup (28,82%), bekerja/mencari nafkah (22,02%), tidak ada biaya sekolah (18,68%), menikah (3,07%), cacat/disabilitas (1,98%), mengurus rumah tangga (1,95%), jarak sekolah yang jauh (1,46%), mengalami perundungan/*bullying* (0,48%), dan lainnya (21,51%).

Tabel 1.1 Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2025

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	7- 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
Laki-laki	0,63	6,81	17,31
Perempuan	0,42	4,64	13,36
Total	0,52	5,75	15,38

(Sumber: Statistik Pendidikan 2025)

Putus sekolah merujuk pada kondisi ketika peserta didik menghentikan kehadirannya di institusi pendidikan formal sebelum menyelesaikan jenjang yang sedang ditempuh (Li et al., 2017; Rumberger, 2011). Fenomena ini dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor pada tingkat individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memang menjadi salah satu penyebab utama peserta didik menghentikan pendidikannya, tetapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan. Keterbatasan ekonomi sering kali berinteraksi dengan masalah kesehatan fisik maupun mental, konflik keluarga, rendahnya keterikatan dengan sekolah (*school engagement*), pengalaman perundungan, serta minimnya dukungan sosial sehingga meningkatkan kerentanan remaja untuk keluar dari sekolah (Lavrentsova & Valkov, 2017; Rosada & Lestari, 2022; Szlyk, 2020). Dengan demikian, keputusan peserta didik untuk putus sekolah merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor risiko yang saling memengaruhi sepanjang proses pendidikan (Rumberger, 2011).

Sebagai upaya mengurangi risiko tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai program bantuan pendidikan, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Khusus di Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah juga menyelenggarakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai bentuk dukungan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan administratif dan sosial ekonomi. Kehadiran kedua program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah melalui pengurangan hambatan biaya pendidikan.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa bantuan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya mampu menghilangkan risiko putus sekolah. Penelitian Ulfa dan Rezki (2024) menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar berkontribusi meningkatkan partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Namun, Purnama dan Izzatusholekha (2022) menemukan bahwa masih terdapat peserta didik yang layak menerima PIP tetapi belum memperoleh bantuan secara merata akibat berbagai kendala

implementasi. Selain itu, Haryono dan Rumayya (2025) menunjukkan bahwa meskipun PIP secara empiris mampu menurunkan risiko putus sekolah, keberlanjutan pendidikan tetap dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, karakteristik peserta didik, serta faktor-faktor non-ekonomi lainnya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bantuan finansial merupakan salah satu faktor protektif yang penting, tetapi efektivitasnya akan lebih optimal apabila disertai dukungan keluarga, lingkungan belajar yang kondusif, serta pendampingan psikososial yang memadai.

Istilah putus sekolah merujuk pada keluarnya peserta didik secara resmi dari sistem pendidikan formal, walaupun begitu anak yang mengalami putus sekolah dapat melanjutkan studi melalui pendidikan nonformal (Lavrentsova & Valkov, 2017). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu jalur alternatif yang dapat memfasilitasi reintegrasi bagi remaja yang putus sekolah dari pendidikan formal. Sebagai lembaga pendidikan nonformal, PKBM menawarkan pembelajaran yang terstruktur namun fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak (Tramas, 2023). Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan, PKBM juga dapat menjadi bagian dari sistem dukungan yang membantu remaja membangun kembali harapan, kepercayaan diri, serta orientasi masa depannya. Akan tetapi, meskipun PKBM memberikan kesempatan kedua bagi remaja yang pernah mengalami putus sekolah, warga belajar yang mengikuti pendidikan di PKBM umumnya datang dengan latar belakang pengalaman hidup yang lebih beragam dibandingkan peserta didik di sekolah formal. Mereka tidak hanya menghadapi hambatan akademik, tetapi juga berbagai persoalan psikologis, sosial, ekonomi, maupun keluarga yang pada banyak kasus turut menjadi penyebab terputusnya pendidikan formal (Rumberger, 2011).

Remaja yang melanjutkan pendidikan di PKBM umumnya tidak hanya menghadapi tantangan untuk menyelesaikan pendidikan kesetaraan, tetapi juga berupaya membangun kembali keberfungsian dirinya setelah mengalami pengalaman putus sekolah (Garcia, 2020). Mereka sering kali membawa pengalaman kegagalan akademik, tekanan ekonomi, konflik keluarga, masalah

kesehatan, pengalaman perundungan, maupun hilangnya kepercayaan diri yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bertahan dan melanjutkan pendidikan (Valkov, 2018). Stigma sebagai “anak yang tidak mengenyam pendidikan formal” sering kali membuat remaja merasa rendah diri, mengecilkan harapan mereka, dan membuat mereka semakin terisolasi dari lingkungan sosial (Garcia, 2020). Selain itu, jadwal belajar yang fleksibel terkadang membuka peluang bagi perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan zat (Valkov, 2018).

Penelitian Maphumulo (2024) menunjukkan bahwa peserta didik di *Community Learning Centre* masih menghadapi berbagai tantangan pribadi dan sosial yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan mereka. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Espejon et al. (2024) pada penyelenggaraan *Alternative Learning System* (ALS) di Filipina yang menemukan bahwa layanan pendukung, termasuk pendampingan psikososial, masih menjadi kebutuhan penting bagi warga belajar agar mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikannya. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nonformal tidak hanya ditentukan oleh tersedianya akses belajar yang fleksibel, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam memberikan dukungan psikososial yang membantu warga belajar beradaptasi dengan berbagai tantangan tersebut (Lavrentsova & Valkov, 2017). Dalam konteks ini, resiliensi menjadi kapasitas perkembangan yang penting karena memungkinkan remaja untuk beradaptasi secara positif, membangun kembali harapan, serta melanjutkan pendidikan meskipun menghadapi berbagai tekanan kehidupan (Masten, 2021; Richardson, 2002).

Pemahaman mengenai proses resiliensi menjadi penting karena setiap remaja membangun resiliensinya melalui pengalaman dan sistem dukungan yang berbeda. Masten (2021) menjelaskan bahwa resiliensi berkembang melalui interaksi antara individu dengan sistem protektif di sekitarnya, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan komunitas. Sejalan dengan itu, penelitian Syahrial et al. (2025) menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling pada pendidikan nonformal berperan dalam membantu warga belajar mengatasi hambatan pribadi, sosial, belajar, dan karier sesuai dengan

kebutuhan mereka. Penelitian Kamilin et al. (2026) juga merekomendasikan pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan (*tailored guidance and counseling services*) bagi warga belajar pendidikan kesetaraan agar layanan yang diberikan benar-benar selaras dengan karakteristik, pengalaman, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Pada konteks internasional, Espejon et al. (2024) menemukan bahwa warga belajar *Alternative Learning System* (ALS) di Filipina masih membutuhkan layanan pendampingan, termasuk bimbingan dan konseling, untuk mendukung keberhasilan belajar mereka. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Villaos dan Regencia (2026) yang merekomendasikan integrasi layanan bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan *Alternative Learning System*, serta Gosi & Omaweng (2026) yang menunjukkan pentingnya penguatan layanan bimbingan dan konseling karier pada *Community Learning Center* untuk membantu peserta didik mempersiapkan keberlanjutan pendidikan dan kariernya. Oleh karena itu, peran bimbingan dan konseling menjadi diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Meskipun berbagai penelitian telah menegaskan pentingnya layanan bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal, efektivitas layanan tersebut bergantung pada sejauh mana pendidik dan guru bimbingan dan konseling memahami pengalaman serta kebutuhan psikologis warga belajar. Bagi remaja yang pernah mengalami putus sekolah, layanan bimbingan dan konseling tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian masalah yang tampak, tetapi juga perlu membantu mereka membangun kembali kemampuan untuk beradaptasi, mengembangkan harapan, dan merencanakan masa depan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses resiliensi menjadi landasan penting dalam penyusunan layanan bimbingan dan konseling yang responsif terhadap kebutuhan remaja putus sekolah. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Masten (2021) yang menegaskan bahwa resiliensi berkembang melalui interaksi antara individu dengan berbagai sistem protektif di lingkungannya, serta metateori Richardson (2002) yang memandang resiliensi sebagai proses dinamis sejak individu menghadapi tekanan hingga mencapai reintegrasi. Dengan memahami bagaimana remaja

menjalani setiap tahapan proses tersebut, layanan bimbingan dan konseling di PKBM diharapkan tidak hanya membantu peserta didik bertahan dalam pendidikan, tetapi juga mendukung perkembangan psikologis dan sosial mereka secara lebih optimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumalasari & Huwae (2023) menemukan bahwa optimisme, *active coping*, serta dukungan sosial dari guru BK, teman sebaya, figur panutan dan keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk resiliensi remaja putus sekolah. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian Pratama et al., (2023) yang menegaskan adanya hubungan positif antara dukungan sosial dengan resiliensi remaja putus sekolah di Makassar. Selanjutnya, menurut penelitian Auliya & Hidajat (2025) PKBM berfungsi sebagai moderator dukungan sosial yang memperkuat resiliensi remaja putus sekolah. Adanya interaksi antara ketahanan internal dan dukungan dari fasilitator serta *peer* di PKBM secara signifikan meningkatkan *psychological well-being* remaja putus sekolah. Studi lain oleh Tramas (2023) pada remaja putus sekolah di PKBM Nara Kreatif menunjukkan bahwa resiliensi mereka masuk pada golongan sedang hingga tinggi karena adanya faktor protektif eksternal, seperti dukungan sosial dari teman sebaya serta keluarga yang terjadi di PKBM Nara Kreatif, juga berkat faktor protektif internal seperti regulasi emosi, efikasi diri, optimisme, pengendalian impuls, keterampilan dalam analisis kausal, empati, dan *reaching out*. Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor protektif, seperti optimisme, *active coping*, efikasi diri, juga dukungan sosial dari keluarga dan teman sebaya, memiliki peran yang krusial dalam proses reintegrasi resiliensi remaja pasca mengalami putus sekolah.

Berbagai penelitian mengenai remaja putus sekolah telah menunjukkan bahwa resiliensi dipengaruhi oleh berbagai faktor protektif, seperti dukungan sosial, optimisme, regulasi emosi, efikasi diri, serta keterlibatan keluarga dan lingkungan pendidikan (Auliya et al., 2025; Belva et al., 2024; Kumalasari & Huwae, 2023; Pratama et al., 2023). Penelitian lain juga telah menjelaskan faktor-faktor penyebab putus sekolah, seperti kondisi ekonomi keluarga, konflik keluarga, rendahnya keterikatan dengan sekolah (*school engagement*),

masalah kesehatan, maupun pengalaman perundungan (Banaag et al., 2024; Chavula et al., 2025; Rumberger, 2011). Temuan-temuan tersebut memberikan pemahaman yang penting mengenai faktor risiko dan faktor protektif yang berkaitan dengan putus sekolah maupun resiliensi remaja, sekaligus menjadi dasar penting bagi pengembangan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dalam upaya pencegahan putus sekolah dan penguatan ketahanan psikologis remaja.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi putus sekolah, hubungan antarvariabel, maupun tingkat resiliensi remaja putus sekolah. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak menggambarkan bagaimana remaja sendiri memaknai pengalaman putus sekolah yang dialaminya serta bagaimana proses resiliensi berlangsung dari sudut pandang pengalaman hidup mereka. Padahal, menurut Richardson (2002), resiliensi bukan sekadar hasil akhir berupa kemampuan untuk bangkit, tetapi merupakan proses dinamis yang diawali oleh terganggunya keseimbangan hidup akibat tekanan, kemudian diikuti oleh upaya individu untuk membangun kembali keseimbangan tersebut melalui proses reintegrasi. Sejalan dengan itu, Masten (2021) menjelaskan bahwa resiliensi berkembang melalui interaksi antara individu dengan sistem adaptif yang terdapat dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Dalam konteks Bimbingan dan Konseling, pemahaman terhadap pengalaman subjektif remaja menjadi sangat penting karena konselor perlu melihat klien secara utuh, memahami makna pengalaman hidupnya, serta merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan kondisi psikososial remaja.

Pendekatan fenomenologi dipandang sesuai untuk menjawab kebutuhan tersebut karena memungkinkan peneliti memahami makna pengalaman hidup sebagaimana dirasakan dan dimaknai oleh partisipan (Creswell & Poth, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui alasan remaja mengalami putus sekolah, tetapi juga mengungkap bagaimana mereka memaknai pengalaman tersebut, bagaimana setiap tekanan memengaruhi kehidupan mereka, serta bagaimana mereka menjalani proses resiliensi hingga

mampu membangun kembali harapan dan tujuan hidup setelah melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM menjadi konteks yang menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyediakan akses pendidikan alternatif bagi remaja putus sekolah, tetapi juga menjadi lingkungan baru yang memungkinkan mereka memperoleh dukungan sosial, pengalaman belajar yang lebih adaptif, serta kesempatan untuk menyusun kembali masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami fenomena proses resiliensi remaja putus sekolah di PKBM berdasarkan pengalaman hidup mereka sendiri melalui tahapan proses resiliensi yang dikemukakan oleh Richardson (2002). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan Bimbingan dan Konseling, khususnya mengenai proses resiliensi remaja putus sekolah di PKBM, serta memberikan dasar empiris bagi pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang responsif terhadap faktor risiko, faktor protektif, dan kebutuhan perkembangan warga belajar dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka cakupan fokus penelitian meliputi:

1. Bagaimana remaja memaknai fenomena putus sekolah yang dialami?
2. Bagaimana proses resiliensi yang dialami remaja putus sekolah?

C. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan cakupan fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses resiliensi yang dialami remaja putus sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengungkap proses resiliensi remaja putus sekolah di PKBM, tetapi juga memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu bimbingan dan konseling dengan memberi pemahaman mendalam mengenai dinamika proses resiliensi remaja putus sekolah di lingkungan PKBM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang faktor protektif, memperluas dasar teori resiliensi, serta mendukung pengembangan kurikulum bimbingan yang responsif terhadap dinamika putus sekolah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk penelitian lanjutan mengenai intervensi peningkatan resiliensi pada remaja putus sekolah.

c. Bagi Pengampu Kebijakan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pencegahan putus sekolah dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pendidikan formal bagi peserta didik yang kembali bersekolah.